KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Triwulan II

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan III BP3KP Kalimantan II TA 2026 ini dapat disusun dengan baik dan lancar. Laporan ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam periode triwulan berjalan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, realisasi program, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program dan kegiatan di periode selanjutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Harapannya, Laporan Kinerja ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas ke depan.

Samarinda, 13 Juli 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan II

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Mustofa Otfan, S.T., M.M.
NIP. 19830318 200901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **2**

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Tugas dan Fungsi 2

1.2.1 Tugas 3

1.2.2 Fungsi 3

1.3 Struktur Organisasi 4

1.4 Sumber Daya Manusia 4

BAB II CAPAIAN KINERJA **9**

2.1 Target Kinerja Triwulan III 9

2.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra 30

2.3 Capaian Target Triwulan 42

2.3.1 Capaian Target Triwulan II DIPA Sekretariat Jenderal 42

2.3.2 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman . 43

2.3.3 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 46

2.3.4 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan . 49

2.3.5 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 52

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan 53

BAB III PENUTUP 57

3.1 Kesimpulan 57

3.2 Rencana Tindak Lanjut 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai BP3KP Kalimantan II 5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Pendidikan 5
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian..... 6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Golongan 6
Tabel 2.1 Kronologi Revisi DIPA..... 9
Tabel 2.2 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III DIPA Sekretariat Jenderal. 12
Tabel 2.3 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 15
Tabel 2.4 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 18
Tabel 2.5 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III 2026 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 22
Tabel 2.6 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III 2026 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko..... 27
Tabel 2.7 Metode Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra 31
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal42
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026 43
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 44
Tabel 2.11 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026 45
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 46
Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026 48
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 49
Tabel 2.15 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026 51

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 52
Tabel 2.17 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal TKPR terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026 52
Tabel 2.18 Ringkasan Potensi dan Permasalahan serta Rencana Tindak Lanjut..... 53
Tabel 3.1 Perbandingan Rencana dan Realisasi Seluruh DIPA pada Triwulan II 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II 4
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Gambar 1.3 Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian 6
Gambar 1.4 Pegawai BP3KP Berdasarkan Golongan 7
Gambar 2.1 DIPA Sekretariat Jenderal Revisi ke 5 Tahun Anggaran 2026 13
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Sekretaris Jenderal 14
Gambar 2.3 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Revisi Ke 5 Tahun Anggaran 2026 17
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman 18
Gambar 2.5 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke 5 Tahun Anggaran 2026 20
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan 21
Gambar 2.7 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi ke 4 25
Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan 26
Gambar 2.9 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Revisi ke 3. 28
Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP dan Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 29

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
Pendahuluan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja triwulan disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu tiga bulan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kendala yang muncul selama periode triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana strategis dan prinsip tata kelola yang baik.

Laporan Triwulan III merupakan bagian dari sistem pelaporan kinerja yang disusun secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu April sampai dengan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, baik dari aspek fisik maupun keuangan, serta sebagai sarana evaluasi terhadap tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi yang telah ditetapkan.

Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Laporan Triwulan III memuat informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian target kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi selama periode pelaporan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pada triwulan berikutnya.

Penyusunan laporan ini juga mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, terukur, dan akuntabel sebagai bahan pengambilan keputusan serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan secara teknis berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.1 Tugas

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
b. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II terdiri dari Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merupakan satu diantara satu unit organisasi yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki 4 wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan IKN Nusantara. Adapun struktur organisasi dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II di tunjukan pada gambar berikut:

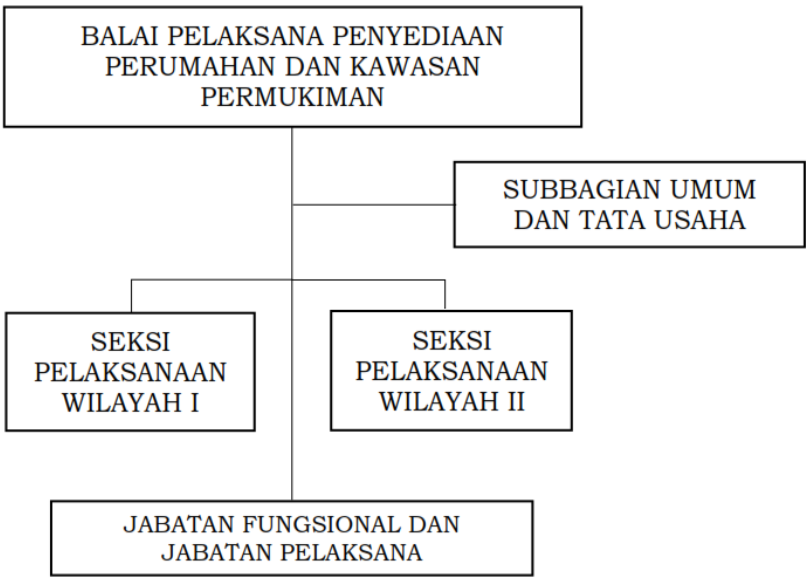

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks BP3KP Kalimantan II, SDM berperan strategis dalam menunjang keberhasilan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan SDM yang optimal, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun distribusinya. Berikut adalah gambaran kondisi SDM BP3KP Kalimantan II yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengelolaan kegiatan yang berjalan, sebagai dasar dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II yang terdata pada tahun 2026.

Tabel 1.1 Data Pegawai BP3KP Kalimantan II

No	Unit Kerja	Pegawai			Total
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	7	12	43
2	Satuan Kerja PKP Kalimantan Timur	17	11	5	33
3	Satuan Kerja PKP Ibu Kota Negara Nusantara	17	4	21	42
4	Satuan Kerja PKP Kalimantan Selatan	13	15	7	35
5	Satuan Kerja PKP Kalimantan Utara	12	6	0	18
Total Keseluruhan		**83**	**43**	**45**	**171**

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan merupakan indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia pada suatu organisasi. Komposisi ini mencerminkan tingkat kompetensi pegawai serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II berdasarkan tingkat Pendidikan.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Pendidikan

Pendidikan	Bidang Pendidikan		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SLTA atau kurang	21	3	24
D1 - D3	3	2	5
D4/S1	80	46	126
S2	14	2	16
Total	**118**	**53**	**171**

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

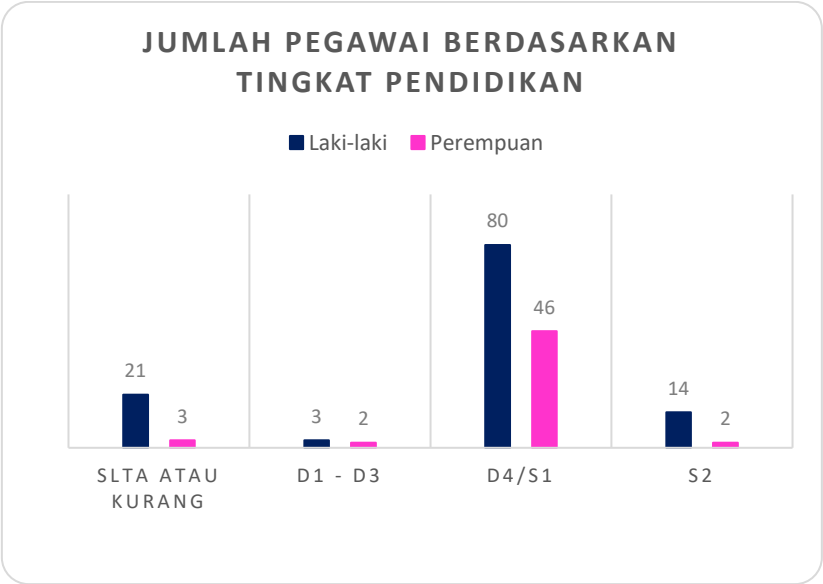

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan struktur sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengelompokan ini memberikan gambaran mengenai komposisi pegawai, baik yang

berstatus struktural, fungsional, maupun pelaksana, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, perencanaan kebutuhan pegawai, serta optimalisasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II berdasarkan status kepegawaian.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Struktural	4	0	4
Fungsional	67	37	104
Pelaksana	12	2	14
Total	**83**	**39**	**122**

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

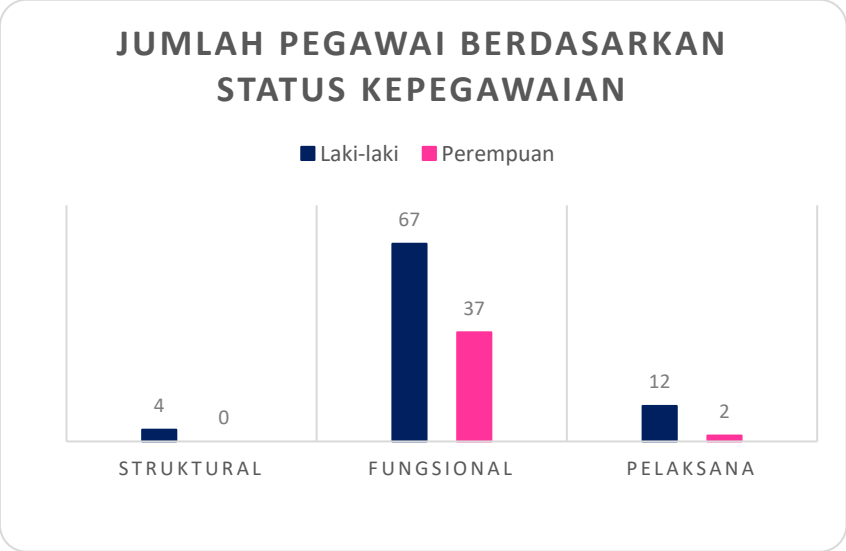

Gambar 1.3 Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan golongan merupakan indikator penting dalam menggambarkan struktur dan jenjang karier aparatur sipil negara dalam suatu organisasi. Pengelompokan ini mencerminkan tingkat kepangkatan, pengalaman, serta tanggung jawab yang diemban, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, pembinaan karier, dan perencanaan kebutuhan pegawai guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Golongan

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Golongan III/a	40	17	57
Golongan III/b	2	4	6
Golongan III/c	2	0	2
Golongan III/d	7	1	8
Golongan IV/a	8	0	8
Golongan IV/b	1	1	2
Total	**60**	**23**	**83**

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

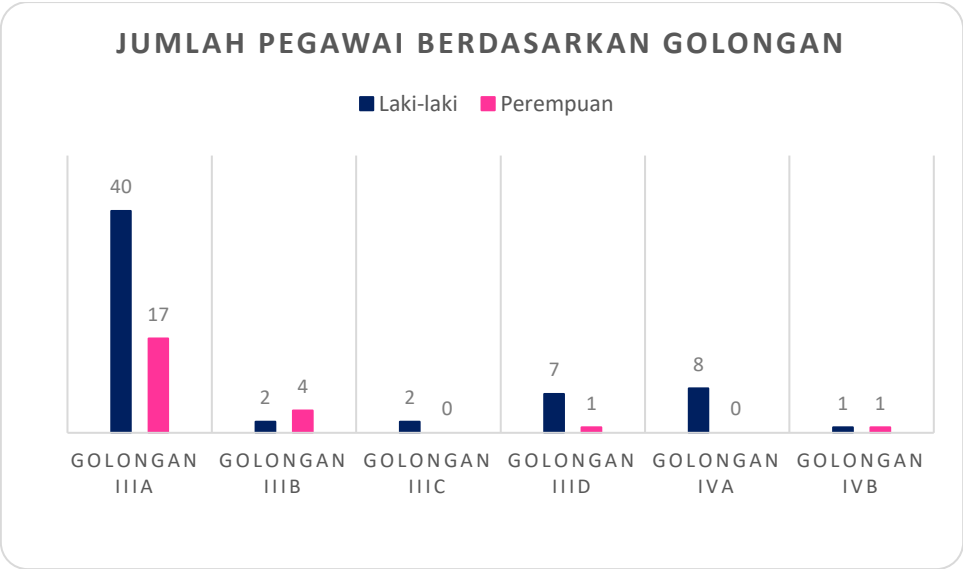

Gambar 1.4 Pegawai BP3KP Berdasarkan Golongan

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Upaya pengelolaan SDM dilakukan melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan kinerja yang terukur guna meningkatkan produktivitas dan profesionalisme. Dalam rangka memastikan efektivitas tersebut, pelaksanaan analisis jabatan pada akhir tahun menjadi instrumen penting sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat produktivitas dan kesesuaian beban kerja pegawai, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun. Hasil analisis jabatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan penataan SDM, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun distribusinya. Dengan demikian, pengelolaan SDM diharapkan semakin optimal, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi ke depan.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2
Capaian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran 2026

BAB II
CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan III

Target kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026. Penetapan target ini menjadi acuan dasar bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II dalam mengarahkan pelaksanaan program serta kegiatan agar berjalan efektif dan terukur sepanjang tahun berjalan. Adapun target kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun 2026 pada Triwulan III disusun berdasarkan Pengesahan DIPA efektif pada priode berjalan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja pada Triwulan III.

Berdasarkan periode berjalan telah dilakukan beberapa kali Revisi DIPA yang mengakibatkan adanya penyesuaian pada perubahan target dan pagu anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, pada akhir Triwulan III disusun Perjanjian Kinerja Revisi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar untuk membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Adapun kronologi revisi DIPA di lingkungan BP3KP Kalimantan II disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kronologi Revisi DIPA

No	Unit Organisasi	Pagu Anggaran
1	**Sekretariat Jenderal**	
	Kronologi Perubahan	**Nominal**
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA-146.01.1.691412/2026 Digital Stamp : DS:2799-2400-0628-6600 Tanggal : 01 Desember 2025	1.866.585.000
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:6237-7094-1905-8796 Tanggal : 29 Desember 2025	1.312.809.000
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:6237-7094-1905-8796 Tanggal : -	1.312.809.000
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:6237-7094-1905-8796 Tanggal : -	1.312.809.000
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:6237-7094-1905-8796 Tanggal : 29 April 2026	1.312.809.000
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:5122-5163-0327-8811 Tanggal : 25 Mei 2026	1.372.809.000
2	**Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**	
	Kronologi Perubahan	**Nominal**

No	Unit Organisasi	Pagu Anggaran
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.03.1.691466/2026 Digital Stamp : DS:6038-4202-1560-7308 Tanggal : 01 Desember 2025	604.500.000
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:3222-8390-7078-9160 Tanggal : 29 Desember 2025	371.045.000
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:3099-0048-6020-3566 Tanggal : 18 Februari 2026	531.045.000
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:3099-0048-6020-3566 Tanggal : -	531.045.000
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:2904-0835-6845-0016 Tanggal : 24 April 2026	399.454.000
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:2904-0835-6845-0016 Tanggal : 08 Mei 2026	399.454.000
3	**Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**	
	Kronologi Perubahan	**Nominal**
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.04.1.691520/2026 Digital Stamp : DS:6456-7608-5070-5944 Tanggal : 01 Desember 2025	1.968.124.000
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:2082-5006-4000-0129 Tanggal : 29 Desember 2025	699.072.000
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:0498-9100-3095-3506 Tanggal : 13 Februari 2026	382.014.000
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:0498-9100-3095-3506 Tanggal : -	382.014.000
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:5137-6300-6475-4538 Tanggal : 23 April 2026	311.097.000
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:5137-6300-6475-4538 Tanggal : 11 Mei 2026	311.097.000
-	Revisi ke 06 Digital Stamp : DS:5137-6300-6475-4538 Tanggal : -	311.097.000
4	**Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**	
	Kronologi Perubahan	**Nominal**
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.05.1.691574/2026 Digital Stamp : DS:8069-0705-7360-8967 Tanggal : 01 Desember 2025	766.900.000

No	Unit Organisasi	Pagu Anggaran
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:5168-0376-5050-5429 Tanggal : 29 Desember 2025	419.019.000
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:9043-6220-9895-7508 Tanggal : 13 Februari 2026	375.415.000
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:1293-0298-2006-6125 Tanggal : 23 April 2026	355.574.000
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:1293-0298-2006-6125 Tanggal : 07 Mei 2026	355.574.000
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:1293-0298-2006-6125 Tanggal : -	355.574.000
-	Revisi ke 06 Digital Stamp : DS:1293-0298-2006-6125 Tanggal : -	355.574.000
5	**Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**	
	Kronologi Perubahan	**Nominal**
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.06.1.691607/2026 Digital Stamp : DS:0890-1690-1646-4328 Tanggal : 01 Desember 2025	297.717.000
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:1733-0741-5800-0152 Tanggal : 29 Desember 2025	170.115.000
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:5317-1449-6436-8407 Tanggal : 24 April 2026	107.674.000
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:5317-1449-6436-8407 Tanggal : 08 Mei 2026	107.674.000
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:5317-1449-6436-8407 Tanggal : -	107.674.000

Sumber: DIPA BP3KP Kalimantan II dan Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II

A. DIPA Sekretariat Jenderal

Target kinerja untuk DIPA Sekretariat Jenderal tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal dan untuk Persentase Target Capaian Triwulan III tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026. Terdapat perubahan pada DIPA Sekretariat Jenderal berupa penambahan alokasi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan di BP3KP Kalimantan II. Sehubungan dengan hal tersebut, target kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya disesuaikan untuk mengakomodasi tambahan anggaran dan mendukung optimalisasi pencapaian kinerja. Berikut adalah Target Kinerja BP3KP Kalimantan II dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal.

Tabel 2.2 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III DIPA Sekretariat Jenderal

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
Sekretariat Jenderal				
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II**			
1	**Jumlah Layanan Umum**	**5 Layanan**	**Tw II – Pelaksanaan Kegiatan**	**52,40%**
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		52,40%
2	**Jumlah Layanan Perkantoran**	**5 Layanan**		52,40%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		52,40%
3	**Jumlah Layanan Sarana Internal**	**21 Unit**		52,40%
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Unit		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Unit		52,40%
	Satker PKP Kalsel	8 Unit		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Unit		52,40%
	Satker PKP IKN	10 Unit		52,40%

NO	SATUAN KERJA	PAGU
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp1.372.809.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp633.479.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp926.772.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp833.377.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp 1.677.116.000,00
TOTAL		**Rp5.443.553.000,00**

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6570-0184-0901-8155

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2026

Revisi ke 05
Tanggal : 25 Mei 2026

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691412)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	:	Rp. 1.372.809.000	(SATU MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.372.809.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	1.372.809.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.372.809.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 1.372.809.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
Plh. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6570-0184-0901-8155

Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker	: (691412)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1.372.809.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			1.372.809.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.187.470.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	49.208.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	1.138.262.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	185.339.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	185.339.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

Gambar 2.1 DIPA Sekretariat Jenderal Revisi ke 5 Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Didyk Choiroel	**Mustofa Otfan**
NIP. 19710416 199201 1 001	NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	1	Jumlah Layanan Umum	5	Layanan
		2	Jumlah Layanan Perkantoran	5	Layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	21	Unit

	KEGIATAN	PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	1.372.809.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	633.479.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	926.772.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	833.377.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	1.677.116.000,00
		Rp	**5.443.553.000,00**

Jakarta, 23 Juni 2026

SKRETARIS JENDERAL	KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIDYK CHOIROEL	**MUSTOFA OTFAN**

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Sekretaris Jenderal

B. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Persentase Target Capaian Triwulan III juga tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026. Terdapat penyesuaian target pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, yaitu **penghapusan Indikator Kinerja 2** 'Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman' pada **Sasaran Kegiatan 2** 'Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan, dan Pemenuhan PSU Kawasan Permukiman'. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas revisi DIPA yang mengubah target dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah Target Kinerja BP3KP Kalimantan II yang telah disesuaikan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Tabel 2.3 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	**Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni**			
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan		52,40%
SK 2	**Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU kawasan permukiman**			
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	1 Dokumen	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
SK 3	**Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman**			
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
2	**Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman**	**900 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP Kaltim	300 Unit		52,40%
	Satker PKP Kalsel	600 Unit		52,40%
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**			
1	**Jumlah Layanan Umum**	**5 Layanan**	**Tw II – Pelaksanaan Kegiatan**	**52,40%**
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		52,40%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		52,40%
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		52,40%
3	Jumlah BMN	1 Layanan		52,40%

NO	SATUAN KERJA	PAGU
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp399.454.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp6.301.122.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp12.738.737.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp25.997.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp15.000.000,00
Total		**Rp19.480.310.000,00**

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

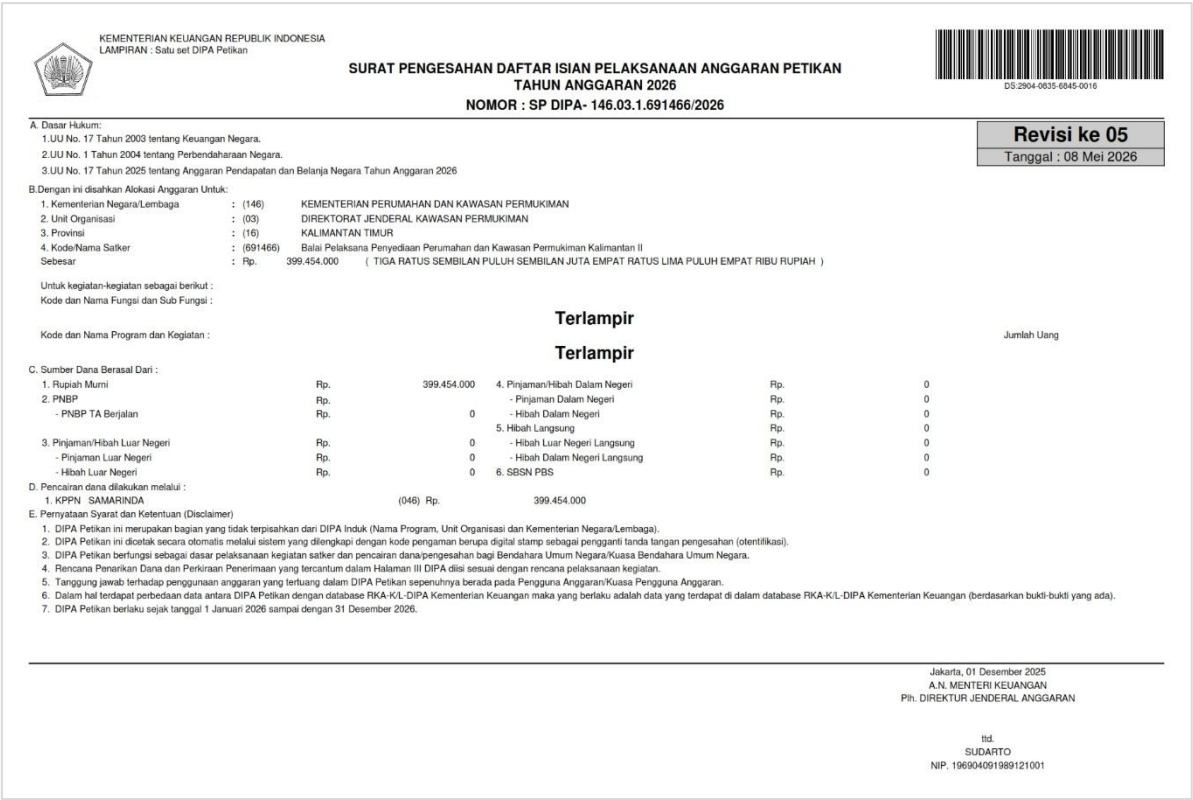

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2904-0635-6845-0016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2026

Revisi ke 05
Tanggal : 08 Mei 2026

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 399.454.000 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	399.454.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 399.454.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
Plh. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2904-0835-6845-0016

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				333.233.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				333.233.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7659.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	33.176.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1,00	dokumen	33.176.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7659.CBR	Dukungan Teknis		2,00	Dokumen	191.805.000
Rincian Output	:	01 CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU		1,00	Dokumen	84.666.000
		02 CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman		1,00	Dokumen	107.139.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		1,00	Rekomendasi Kebijakan	108.252.000
Rincian Output	:	01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	108.252.000
Program	:	146.03.WA	Program Dukungan Manajemen				66.221.000
Kegiatan	:	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				66.221.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	66.221.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum		1,00	Layanan	41.220.000
		02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1,00	Layanan	12.461.000
		03 EBA.Z06	Layanan BMN		1,00	Layanan	12.540.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

Gambar 2.3 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Revisi Ke 5 Tahun Anggaran 2026

REVISI

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2026

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Fitrah Nur	**Mustofa Otfan**
NIP. 19670419 199403 1 003	NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	1	Dokumen
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
		2	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	900	Unit
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	5	Layanan
		2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
		3	Jumlah BMN	1	Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	399.454.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	6.301.122.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	12.738.737.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	25.997.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	15.000.000,00
		Rp	19.480.310.000,00

Jakarta, 23 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

MUSTOFA CITFAN

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

C. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan. Persentase Target Capaian Triwulan III juga tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026. Terdapat penyesuaian target pada DIPA Direktorat Jendera Perumahan Perdesaan baik pada aspek target maupun anggaran, penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas revisi DIPA yang mengubah target dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Tabel 2.4 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan**			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
2	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen		52,40%
3	**Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**	**3 Laporan**		**52,40%**
	Satker PKP Kaltim	1 Laporan		52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Laporan		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Laporan		52,40%
SK 2	**Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan**			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan		52,40%
3	**Jumlah PSU Perumahan Tapak Perdesaan**	**80 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP Kalsel	80 Unit		52,40%
SK 3	**Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan**			
1	**Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan**	**200 Unit**	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
	Satker PKP Kaltara	200 Unit		52,40%
2	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan	**15 Hektar**		52,40%
	Satker PKP Kaltara	15 Hektar		52,40%
SK 4	**Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan**			
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
2	**Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan**	**5400 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP Kaltim	1800 Unit		52,40%
	Satker PKP Kalsel	2700 Unit		52,40%
	Satker PKP Kaltara	900 Unit		52,40%
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**			
1	**Jumlah Layanan Umum**	**4 Layanan**	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	**52,40%**
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		52,40%
SK 2	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**			
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
SATUAN KERJA			**PAGU**	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II		Rp311.097.000,00	

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur		Rp39.131.001.000,00	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		Rp59.396.501.000,00	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara		Rp30.699.973.000,00	
TOTAL			**Rp129.538.572.000,00**	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

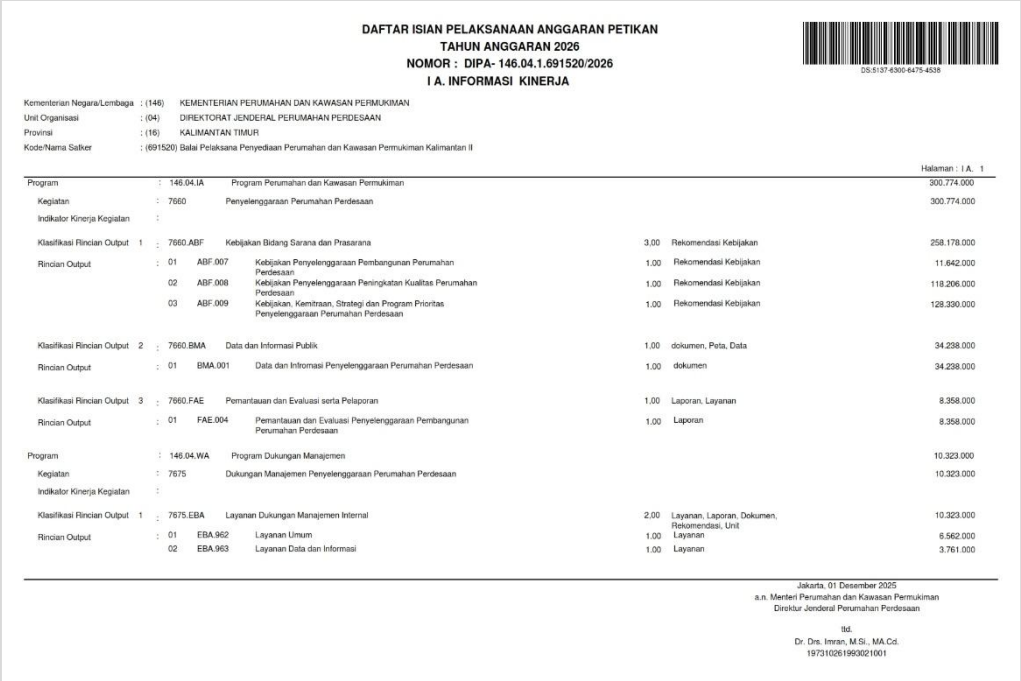

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5137-6300-6475-4538

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			300.774.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			300.774.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	258.178.000
Rincian Output	:	01 ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	11.642.000
		02 ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	118.206.000
		03 ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	128.330.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	34.238.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	dokumen	34.238.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	8.358.000
Rincian Output	:	01 FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	8.358.000
Program	:	146.04.WA	Program Dukungan Manajemen			10.323.000
Kegiatan	:	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			10.323.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.323.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	6.562.000
		02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	3.761.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

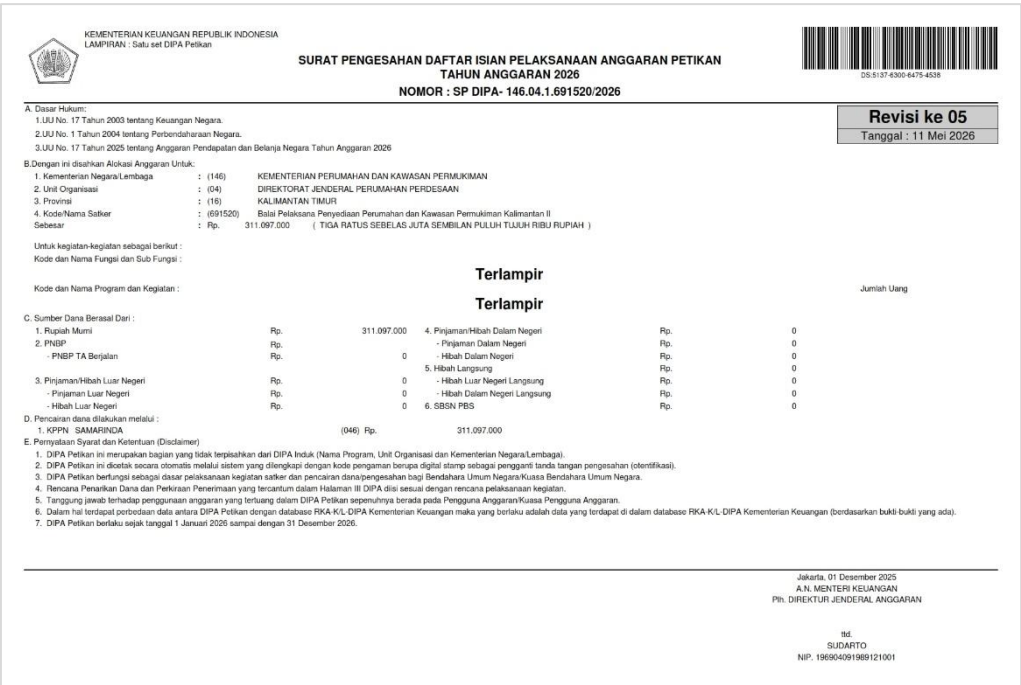

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2026

DS:5137-6300-6475-4538

Revisi ke 05
Tanggal : 11 Mei 2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 311.097.000 (TIGA RATUS SEBELAS JUTA SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	311.097.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 311.097.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
Plh. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

Gambar 2.5 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke 5 Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 02

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rini Dyah Mawarty**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2026

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Rini Dyah Mawarty	**Mustofa Otfan**
NIP. 19701215 199803 2 007	NIP. 198303 18 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pengenggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
		3	Jumlah PSU Perumahan Tapak Perdesaan	80	Unit
3	Meningkatnya hunian permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	200	Unit
		2	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan	15	Hektar
4	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5400	Unit
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	4	Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	311.097.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	39.131.001.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	59.396.501.000,00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	30.699.973.000,00
	Rp	**129.538.572.000,00**

Jakarta, 23 Juni 2026

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II**
RINI DYAH MAWARTY	**MUSTOFA OTFAN**

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

D. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan. Persentase Target Capaian Triwulan III juga tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026. Terdapat penyesuaian target pada DIPA Direktorat Jendera Perumahan Perkotaan baik pada aspek target maupun anggaran, penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas revisi DIPA yang mengubah target dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2.5 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III 2026 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	**Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**			
1	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
2	**Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**	**5 Laporan**		**52,40%**
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		52,40%
SK 2	**Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan**			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
SK 3	**Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan**			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
SK 4	**Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan**			
1	**Jumlah PSU Perumahan Tapak Perkotaan**	**168 Unit**	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	**52,40%**
	Satker PKP Kaltim	168 Unit		52,40%
2	**Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan**	**44 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP Kalsel	44 Unit		52,40%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
3	**Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan**	**65 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP Kaltim	65 Unit		52,40%
4	**Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan**	**240 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP IKN	240 Unit		52,40%
5	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan		52,40%
SK 5	**Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan**			
1	**Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan**	**2777 Unit**		**52,40%**
	Satker PKP Kaltim	1177 Unit		52,40%
	Satker PKP Kalsel	700 Unit	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
	Satker PKP Kaltara	900 Unit		52,40%
2	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan		52,40%
Program Dukungan Manajemen				
SK 1	**Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**			
1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan		52,40%
2	**Jumlah Layanan Umum**	**5 Layanan**		**52,40%**
	Balai P3KP Kalimantan II	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltim	1 Layanan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
	Satker PKP Kalsel	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP Kaltara	1 Layanan		52,40%
	Satker PKP IKN	1 Layanan		52,40%
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		52,40%
KEGIATAN		**PAGU APBN**		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II		Rp355.574.000,00	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur		Rp109.953.161.000,00	
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		Rp39.380.020.000,00	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara		Rp19.563.774.000,00	
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara		Rp51.215.099.000,00	
TOTAL			**Rp220.467.628.000,00**	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1293-0298-2006-6125

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2026

Revisi ke 04
Tanggal : 07 Mei 2026

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (691574)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 355.574.000	(TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	355.574.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 355.574.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1293-0298-2006-6125

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Program	: 146.05.IA		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			320.566.000
Kegiatan	: 7661		Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			320.566.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan			
	2. 02		Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan			
	3. 03		Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan			
	4. 04		Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
	5. 05		Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	259.645.000
Rincian Output	: 01	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	63.184.000
	02	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	41.584.000
	03	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	45.292.000
	04	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	52.070.000
	05	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	57.515.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	60.921.000
Rincian Output	: 01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.00	Laporan	60.921.000
Program	: 146.05.WA		Program Dukungan Manajemen			35.008.000
Kegiatan	: 7676		Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			35.008.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1293-0298-2006-6125

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1 :	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	35.008.000
Rincian Output	: 01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	10.607.000
	02	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	14.163.000
	03	EBA.Z06	Layanan BMN	1.00	Layanan	10.238.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

Gambar 2.7 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi ke 4 Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 2

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sri Haryati	**Mustofa Otfan**
NIP. 19710707 199703 2 004	NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Pengbunian Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Pengbunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah PSU Perumahan Tapak Perkotaan	168 Unit
		2	Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
		3	Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	65 Unit
		4	Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240 Unit
		5	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2677 Unit
		2	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
		2	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan
		3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

	KEGIATAN	PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	355.574.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	109.953.161.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	37.008.224.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	19.563.774.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	51.215.099.000,00
		Rp	**218.095.832.000,00**

Jakarta, 23 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

MUSTOFA OTTAN

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

E. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target kinerja untuk DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dan Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan untuk Persentase Target Capaian Triwulan III tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026. Terdapat perubahan pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berupa pengurangan alokasi anggaran dari triwulan sebelumnya yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan di BP3KP Kalimantan II. Sehubungan dengan hal tersebut, target kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya disesuaikan untuk mengakomodasi pengurangan anggaran guna mendukung optimalisasi pencapaian kinerja. Berikut adalah Target Kinerja BP3KP Kalimantan II dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 2.6 Target Kinerja BP3KP Kalimantan II Triwulan III 2026 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Triwulan II
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SK 1	**Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
SK 2	**Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
SK 3	**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman**			
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	Tw II – Pelaksanaan Kegiatan	52,40%
KEGIATAN			**PAGU APBN**	
1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rp107.674.000,00	
TOTAL			**Rp107.674.000,00**	

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

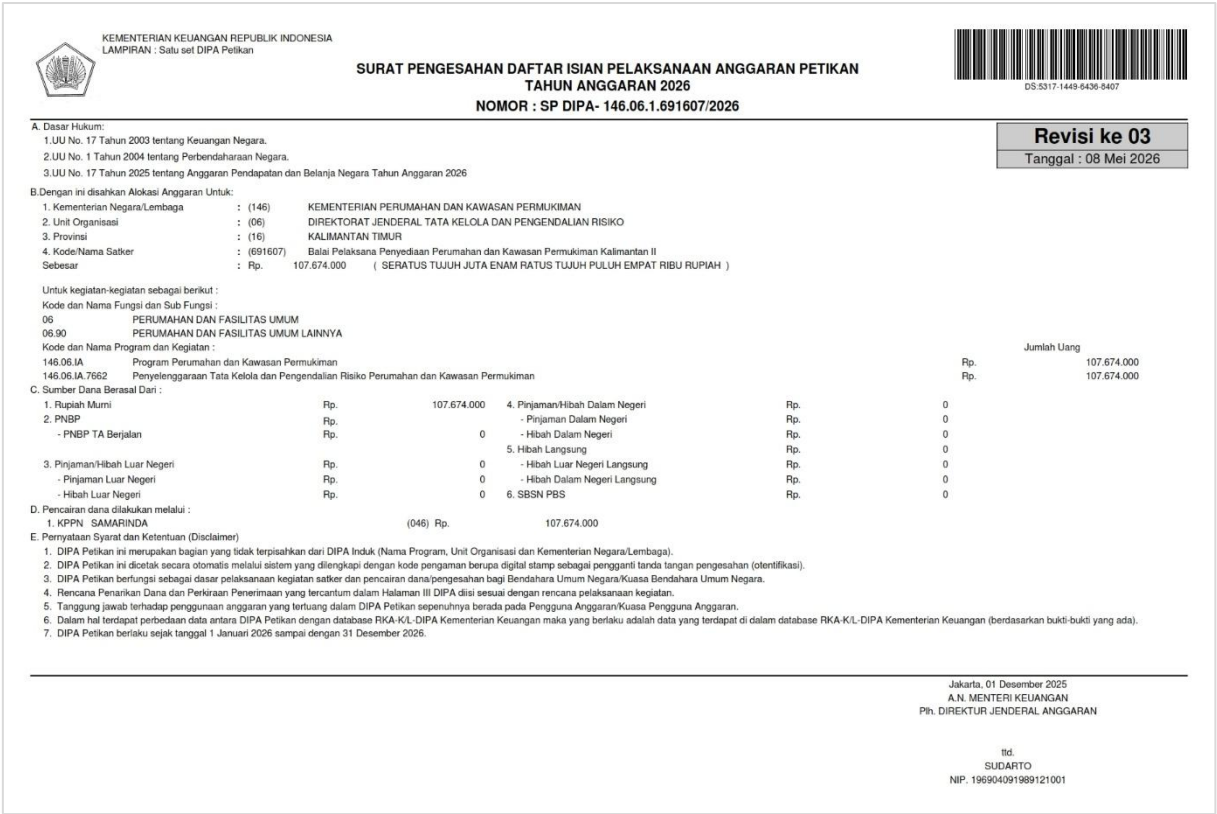

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5317-1449-6436-8407

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691607/2026

Revisi ke 03
Tanggal : 08 Mei 2026

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR	
4. Kode/Nama Satker	: (691607)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	
Sebesar	: Rp. 107.674.000	(SERATUS TUJUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)	

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			Jumlah Uang
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	107.674.000
146.06.IA.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	107.674.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	107.674.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 107.674.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
Plh. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5317-1449-6436-8407

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			107.674.000
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			107.674.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	83.897.000
Rincian Output	:	01 ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.00	Rekomendasi Kebijakan	20.822.000
		02 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2.00	Rekomendasi Kebijakan	63.075.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	23.777.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1.00	Laporan	23.777.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ttd.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

Gambar 2.9 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Revisi ke 3 Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Roberia**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Roberia	**Mustofa Otfan**
NIP. 19700423 200501 1 007	NIP. 19880318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp	107.674.000,00
Rp	**107.674.000,00**

Jakarta, 23 Juni 2026

PLT. DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ROBERIA

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

MUSTOFA OTFAN

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP dan Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra

Metode Pengukuran Kinerja Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 memuat hasil pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan dengan mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra serta selaras dengan target nasional yang ditetapkan oleh masing-masing unit organisasi. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi maupun kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Melalui pengukuran kinerja berdasarkan Renstra, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berikut adalah pengukuran kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Renstra.

Tabel 2.7 Metode Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
SASARAN STRATEGIS: **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan**											
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:											
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi										
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Hunian Layak**											
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	DIPA Ditjen KP	PBF.001	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	175.000	1	108.252	51.262	29,29%	
		BMA.001	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	1	60.000	1	33.176	15.085	25,14%	
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	1	32.632	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
	DIPA Ditjen Perdesaan	PEA.001	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		ABF.009	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	1.168.686	1	128.330	64.426	5,51%	
		BMA.001	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan		Dokumen	1	452.253	1	34.238	9.227	2,04%	
		FAE.001	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan		Laporan	4	1.551.126	3	121.918	75.076	4,84%	
			a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	727.485	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	1	233.805	1	33.161	29.785	12,74%	
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	280.842	1	38.213	18.333	6,53%	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	1	308.994	1	50.544	26.958	8,72%	
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.001	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	190.000	1	63.184	50.274	26,46%	
		FAE.001	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan		Laporan	5	445.000	5	150.385	80.563	54%	
			a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	155.000	1	60.921	30.186	19,47%	
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	1	75.000	1	25.997	16.280	21,71%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	70.000	1	19.023	18.996	27,14%	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	1	70.000	1	15.965	15.100	21,57%	
			e	Satker IKN	Laporan	1	75.000	1	28.479	0	0,00%	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II												
	OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen Perdesaan dan Perkotaan	RBB.001	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum		Unit	915	13.411.095	180	3.085.772	22.303	0,17%	
			a	Kalimantan Selatan	Unit	682	9.996.029	80	977.372	22.303	0,22%	
			b	Kalimantan Timur	Unit	181	2.652.905	100	2.108.400	0	0,00%	
			c	Kalimantan Utara	Unit	52	762.161	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
	DIPA Ditjen KP	CBR.001	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU		Dokumen	-	-	1	84.666	37.308	44,07%	Target Tahun 2026 tidak ditetapkan pada Renstra
	DIPA Ditjen Perdesaan	CBR.001	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan		Dokumen	1	2.899.352	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
		CBR.001	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan		Dokumen	1	293.370	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.002	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	105.000	1	41.584	23.477	22,36%	
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni												
	OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen KP, Perdesaan, dan Perkotaan	RBB.008	Jumlah unit rumah swadaya		Unit	9.173	222.055.398	9.077	196.450.037	26.560.393	11,96%	
			a	Kalimantan Selatan	Unit	4.063	98.355.073	4.000	86.267.136	17.035.749	17,32%	
			b	Kalimantan Timur	Unit	3.170	76.737.775	3.277	70.927.650	5.718.259	7,45%	
			c	Kalimantan Utara	Unit	1.940	46.962.550	1.800	39.255.251	3.806.385	8,11%	
			Jumlah rumah khusus yang terbangun		Unit	1.793	772.683.713	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			a	Kalimantan Selatan	Unit	239	102.995.765	-	-	-	-	
			b	Kalimantan Timur	Unit	775	333.982.085	-	-	-	-	
			c	Kalimantan Utara	Unit	779	335.705.863	-	-	-	-	
	DIPA Ditjen Perkotaan		Jumlah rumah susun yang terbangun		Unit	220	414.155.460	349	157.551.951	102.994.226	24,87%	
			RBB.003	Kalimantan Selatan	Unit	88	165.662.184	44	24.152.295	15.275.216	9,22%	
			RBB.004	Kalimantan Timur	Unit	44	82.831.092	65	82.222.369	37.872.468	45,72%	
				Kalimantan Utara	Unit	44	82.831.092	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
			RBB.007	IKN	Unit	44	82.831.092	240	51.177.287	49.846.542	60,18%	
	DIPA Ditjen KP	CBR.002	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Dokumen	1	88.500	1	107.139	59.186	66,88%	
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh		Laporan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			e	Satker IKN	Laporan	-	-	-	-	-	-	
	DIPA Ditjen Perdesaan	FAE.004	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		Laporan	1	482.511	1	8.358	2.418	0,50%	
		ABF.007	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	246.000	1	11.642	6.732	2,74%	
		ABF.008	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	1.920.000	1	118.206	78.121	4,07%	
			Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan		Laporan	-	-	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
			a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-	-	-	-	-	
			e	Satker IKN	Laporan	-	-	-	-	-	-	
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.004	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	120.000	1	52.070	31.683	26,40%	
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.005	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	2.582.700	1	57.515	39.635	1,53%	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan												
	OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen Perkotaan	ABF.003	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	85.000	1	45.292	27.967	32,90%	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS												
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu											
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh**												

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu												
	OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen Perdesaan		Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		Hektar	15,00	31.575.000	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			RBB.003	Kalimantan Selatan	Hektar	-	-	-	-	-	-	
			RBB.004	Kalimantan Timur	Hektar	-	-	-	-	-	-	
			RBB.007	Kalimantan Utara	Hektar	15,00	31.575.000	15	8.879.785	222.479	0,70%	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS												
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan											
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman												
SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman**												
	OUTPUT KEGIATAN:											
	DIPA Ditjen TKPR	FAE.001	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko		Laporan	1	52.600	1	23.777	16.446	31,27%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	DIPA Ditjen TKPR	ABF.004	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	182.150	1	20.822	8.938	4,91%	
SASARAN KEGIATAN: **Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	DIPA Ditjen TKPR	ABF.005	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	225.000	1	63.075	15.635	6,95%	Pada DIPA efektif ABF.005 merupakan satu kesatuan
		ABF.005	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	1	225.000	1				
SASARAN STRATEGIS 2: **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**											
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS											
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN PROGRAM: **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II**											
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
	OUTPUT KEGIATAN:										

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1		*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
	EBA.994	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)		Layanan	5	109.713.909	5	4.911.833	2.045.141	1,86%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	32.576.119	1	1.138.262	402.784	1,24%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	19.361.278	1	842.235	504.300	2,60%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	25.354.055	1	562.360	370.423	1,46%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	15.980.737	1	762.992	258.764	1,62%	
		e	Satker IKN	Layanan	1	16.441.720	1	1.605.984	508.869	3,09%	
	EBA.962	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)		Layanan	5	214.200	5	161.042	118.915	55,52%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	63.600	1	49.208	47.156	74,14%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	37.800	1	38.202	37.398	98,94%	
DIPA Sekjen		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	49.500	1	24.784	11.036	22,29%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	31.200	1	24.051	23.325	74,76%	
		e	Satker IKN	Layanan	1	32.100	1	24.797	0	0,00%	
	EBA.951	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)		Layanan	5	999.248	5	370.678	294.201	29,44%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	296.695	1	185.339	185.327	62,46%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	176.338	1	46.335	46.290	26,25%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	230.919	1	46.335	46.300	20,05%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	145.549	1	46.334	16.284	11,19%	
		e	Satker IKN	Layanan	1	149.747	1	46.335	0	0,00%	
DIPA Ditjen KP	EBA.962	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)		Layanan	5	464.000	5	153.531	68.783	14,82%	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1		*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	104.000	1	41.220	16.661	16,02%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	71.000	1	24.637	0	0,00%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	103.000	1	46.677	37.109	36,03%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	85.000	1	25.997	15.013	17,66%	
		e	Satker IKN	Layanan	1	101.000	1	15.000	0	0,00%	
	EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)		Layanan	1	28.500	1	12.461	8.704	30,54%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	28.500	1	12.461	8.704	30,54%	
	EBA.Z06	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)		Layanan	1	27.000	1	12.540	9.159	33,92%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	27.000	1	12.540	9.159	33,92%	
DIPA Ditjen Perdesaan	EBA.962	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	4	477.000	4	46.704	3.793	0,80%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	139.500	1	6.562	2.580	1,85%	
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	112.500	1	28.380	0	0,00%	
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	112.500	1	9.512	0	0,00%	
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	112.500	1	2.250	1.213	1,08%	
	EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	1	14.131	1	3.761	0	0,00%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	14.131	1	3.761	0	0,00%	
DIPA Ditjen Perkotaan	EBA.962	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	5	415.000	5	47.265	23.973	5,78%	
		a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	125.000	1	10.607	7.408	5,93%	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*)/SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)/INDIKATOR		SATUAN	Target Renstra Tahun 2026	Anggaran Renstra Tahun 2026 (Rp Ribu)	Target Pada DIPA Efektif	Pagu Pada DIPA Efektif	Capaian Pada TW II (Rp Ribu)	Persentase Capaian Terhadap Target Renstra (%)	Keterangan
-1			*-2*		*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	70.000	1	6.280	0	0,00%	
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	75.000	1	13.440	11.890	15,85%	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	70.000	1	7.605	4.675	6,68%	
			e	Satker IKN	Layanan	1	75.000	1	9.333	0	0,00%	
		EBA.963	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	1	85.000	1	14.163	10.916	12,84%	
			a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	85.000	1	14.163	10.916	12,84%	
		EBA.Z06	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	1	85.000	1	10.238	0	0,00%	
			a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	85.000	1	10.238	0	0,00%	
			Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	5	500.000	-	-	-	-	Tidak tercantum dalam DIPA efektif
			a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	
			e	Satker IKN	Layanan	1	100.000	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercantum dalam Target yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis. Namun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada BP3KP Kalimantan II telah berjalan sesuai dengan target perencanaan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Kalimantan II dapat dinyatakan telah selaras dan mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan oleh unit organisasi terkait.

2.3 Capaian Target Triwulan

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2026 yang dibagi per triwulanan. Pada dokumen ini capaian target yang dimaksud menggambarkan capaian kinerja khususnya pada Triwulan II terhadap target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja maupun terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahun 2026. Capaian target meliputi capaian kinerja program dan capaian kinerja kegiatan yang merujuk pada target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja terakhir dalam triwulan II, sehingga Pagu yang tertera pada tabel capian merupakan pagu yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja terakhir Triwulan II yang ditetapkan berdasarkan DIPA efektif pada Triwulan II.

2.3.1 Capaian Target Triwulan II DIPA Sekretariat Jenderal

Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II pada Triwulan II DIPA Sekretariat Jenderal, memiliki beberapa Program di bawahnya seperti Layanan Umum, Layanan Perkantoran, dan Layanan Sarana Internal. Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II pada DIPA Sekretariat Jenderal melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Sekretariat Jenderal								
Program Dukungan Manajemen								
	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			5.443.553	2.458.256	45,16%	64,21%
1	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	5.072.875	2.164.055	42,66%	58,03%
	7665.EBA.962	**Layanan Umum**	**5**	**Layanan**	**161.042**	**118.915**	**73,84%**	**67,46%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	49.208	47.156	95,83%	97,87%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	24.784	11.036	44,53%	44,53%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	38.202	37.398	97,90%	97,90%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	24.051	23.325	96,98%	96,98%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	24.797	0	0,00%	0,00%
	7665.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**5**	**Layanan**	**4.911.833**	**2.045.141**	**41,64%**	**48,60%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	1.138.262	402.784	35,39%	37,43%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	562.360	370.423	65,87%	65,87%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	842.235	504.300	59,88%	59,88%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	762.992	258.764	33,91%	48,12%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	1.605.984	508.869	31,69%	31,69%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
2	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)		Layanan	370.678	294.201	79,37%	70,39%
	7665.EBB.951	**Layanan Sarana Internal**	**21**	**Unit**	**370.678**	**294.201**	**79,37%**	**70,39%**
		Satker PKP Balai	1	Unit	185.339	185.327	99,99%	102,03%
		Satker PKP Kaltim	1	Unit	46.335	46.300	99,92%	99,92%
		Satker PKP Kalsel	10	Unit	46.335	46.290	99,90%	100,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Unit	46.334	16.284	35,14%	50,00%
		Satker PKP IKN	8	Unit	46.335	0	0,00%	0,00%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/

Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-II Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-II TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
A	**7665**	**Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal**	**52,40%**	**45,16%**	**64,21%**	**-7,24%**	**11,81%**
1	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	52,40%	42,66%	58,03%	-9,74%	5,63%
2	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	52,40%	79,37%	70,39%	26,97%	17,99%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II TA 2026, Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal memperoleh realisasi keuangan sebesar **45,16%**, masih di bawah target Renaksi **52,40%** (deviasi **-7,24%**), sedangkan realisasi fisik mencapai **64,21%**, melampaui target sebesar **11,81%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara fisik telah berjalan dengan baik, namun penyerapan anggaran, khususnya pada kegiatan **7665.EBA**, masih memerlukan percepatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui percepatan proses administrasi dan pembayaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar realisasi keuangan dapat lebih selaras dengan progres fisik dan target kinerja pada triwulan berikutnya.

2.3.2 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Terdapat beberapa Capaian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II yang melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN.

Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			19.301.778	1.681.670	8,71%	38,74%
1	7659.BMA	Data dan Informasi Publik		Dokumen	33.176	15.085	45,47%	47,53%
	7659.BMA.001	**Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**	**1**	**Dokumen**	**33.176**	**15.085**	**45,47%**	**47,53%**
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	33.176	15.085	45,47%	47,53%
2	7659.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)		Dokumen	191.805	96.494	50,31%	51,72%
	7659.CBR.001	**Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU**	**1**	**Dokumen**	**84.666**	**37.308**	**44,07%**	**46,13%**
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	84.666	37.308	44,07%	46,13%
	7659.CBR.002	**Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**1**	**Dokumen**	**107.139**	**59.186**	**55,24%**	**57,30%**
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	107.139	59.186	55,24%	57,30%
3	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]		Rekomendasi Kebijakan	108.252	51.262	47,35%	49,41%
	7659.PBF.001	**Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**108.252**	**51.262**	**47,35%**	**49,41%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	108.252	51.262	47,35%	49,41%
4	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		Unit	18.968.545	1.518.829	8,01%	6,29%
	7659.RBB.008	**Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman**	**900**	**Unit**	**18.968.545**	**1.518.829**	**8,01%**	6,29%
		Satker PKP Kaltim	300	Unit	6.254.445	77.211	1,23%	1,23%
		Satker PKP Kalsel	600	Unit	12.714.100	1.441.618	11,34%	11,35%
Program Dukungan Manajemen								
	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			178.532	86.646	48,53%	60,96%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	178.532	86.646	48,53%	60,96%
	7674.EBA.962	**Layanan Umum**	**5**	**Layanan**	**153.531**	**68.783**	**44,80%**	**35,95%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	41.220	16.661	40,42%	42,48%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	46.677	37.109	79,50%	79,50%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	24.637	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	25.997	15.013	57,75%	57,75%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	15.000	0	0,00%	0,00%
	7674.EBA.963	**Layanan Data dan Informasi**	**1**	**Layanan**	**12.461**	**8.704**	**69,85%**	**71,91%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	12.461	8.704	69,85%	71,91%
	7674.EBA.Z06	**Layanan BMN**	**1**	**Layanan**	**12.540**	**9.159**	**73,04%**	**75,01%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	12.540	9.159	73,04%	75,01%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/

Tabel 2.11 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-II Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-II TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
B	**7659**	**Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman**	**52,40%**	**8,71%**	**38,74%**	**-43,69%**	**-13,66%**
1	7659.BMA	Data dan Informasi Publik	52,40%	45,47%	47,53%	-6,93%	-4,87%
2	7659.CBR	Dukungan Teknis (Dokumen)	52,40%	50,31%	51,72%	-2,09%	-0,69%
3	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]	52,40%	47,35%	49,41%	-5,05%	-2,99%
4	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	52,40%	8,01%	6,29%	-44,39%	-46,11%
	7674	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**	**52,40%**	**48,53%**	**60,96%**	**-3,87%**	**8,56%**
1	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	52,40%	48,53%	60,96%	-3,87%	8,56%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II TA 2026, Program **Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman** masih menunjukkan realisasi yang jauh di bawah target Renaksi, dengan capaian keuangan sebesar **8,71%** (deviasi **-43,69%**) dan capaian fisik sebesar **38,74%** (deviasi **-13,66%**), yang mengindikasikan masih rendahnya progres pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan **7659.RBB**. Sementara itu, Program **Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan tercatat** realisasi keuangan sebesar **48,53%**, sedikit di bawah target (deviasi **-3,87%**), namun capaian fisik telah mencapai **60,96%**

atau melampaui target sebesar **8,56%**. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, khususnya pada Program 7659, melalui penguatan monitoring dan evaluasi, percepatan penyelesaian administrasi dan pengadaan, serta optimalisasi koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai secara optimal.

2.3.3 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Terdapat beberapa Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II yang melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN. Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			129.488.107	18.472.140	14,27%	39,30%
1	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan	258.178	149.279	57,82%	60,07%
	7660.ABF.007	**Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**11.642**	**6.732**	**57,83%**	**59,85%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	11.642	6.732	57,83%	59,85%
	7660.ABF.008	**Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**118.206**	**78.121**	**66,09%**	**68,12%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	118.206	78.121	66,09%	68,12%
	7660.ABF.009	**Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**128.330**	**64.426**	**50,20%**	**52,23%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	128.330	64.426	50,20%	52,23%
2	7660.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)		Dokumen	34.238	9.227	26,95%	28,98%
	7660.BMA.001	**Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**	**1**	**Dokumen**	**34.238**	**9.227**	**26,95%**	**28,98%**

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
		Satker PKP Balai	1	Dokumen	34.238	9.227	26,95%	28,98%
3	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	130.276	77.493	59,48%	63,71%
	7660.FAE.001	**Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**	**3**	**Laporan**	**121.918**	**75.076**	**61,58%**	**63,71%**
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	38.213	18.333	47,98%	47,98%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	33.161	29.785	89,82%	89,82%
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	50.544	26.958	53,34%	53,34%
	7660.FAE.004	**Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan**	**1**	**Laporan**	**8.358**	**2.418**	**28,92%**	**30,95%**
		Satker PKP Balai	1	Laporan	8.358	2.418	28,92%	30,95%
4	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		Unit	129.065.415	18.236.141	14,13%	4,46%
	7660.RBB.001	**PSU Perumahan Tapak Perdesaan**	**80**	**Unit**	**977.372**	22.303	**2,28%**	**2,28%**
		Satker PKP Kalsel	80	Unit	977.372	22.303	2,28%	2,28%
	7660.RBB.006	**Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan**	**200**	**Unit**	**2.052.347**	**15.555**	**0,76%**	**0,76%**
		Satker PKP Kaltara	200	Unit	2.052.347	15.555	0,76%	0,76%
	7660.RBB.008	**Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan**	**5400**	**Unit**	**117.155.911**	**17.975.804**	**15,34%**	**12,27%**
		Satker PKP Kaltim	1800	Unit	39.083.276	2.373.161	6,07%	6,07%
		Satker PKP Kalsel	2700	Unit	58.357.588	14.018.796	24,02%	24,02%
		Satker PKP Kaltara	900	Unit	19.715.047	1.583.847	8,03%	6,73%
	7660.RBB.011	**Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan**	**15**	**Hektar**	**8.879.785**	**222.479**	**2,51%**	**2,52%**
		Satker PKP Kaltara	15	Hektar	8.879.785	222.479	2,51%	2,52%
Program Dukungan Manajemen								
	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			50.465	3.793	7,52%	12,92%
1	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	50.465	3.793	7,52%	12,92%
	7675.EBA.962	**Layanan Umum**	**4**	**Layanan**	**46.704**	**3.793**	**8,12%**	**23,82%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	6.562	2.580	39,32%	41,35%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	9.512	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	28.380	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	2.250	1.213	53,91%	53,91%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
	7675.EBA.963	**Layanan Data dan Informasi**	**1**	**Layanan**	**3.761**	**0**	**0,00%**	**2,03%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	3.761	0	0,00%	2,03%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/

Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-II Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-II TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
C	**7660**	**Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**	**52,40%**	**14,27%**	**39,30%**	**-38,13%**	**-13,10%**
1	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	52,40%	57,82%	60,07%	5,42%	7,67%
2	7660.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	52,40%	26,95%	28,98%	-25,45%	-23,42%
3	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	52,40%	59,48%	63,71%	7,08%	11,31%
4	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	52,40%	14,13%	4,46%	-38,27%	-47,94%
	7675	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**	**52,40%**	**7,52%**	**12,92%**	**-44,88%**	**-39,48%**
1	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	52,40%	7,52%	12,92%	-44,88%	-39,48%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II TA 2026, Program **Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan** masih belum mencapai target Renaksi dengan realisasi keuangan sebesar **14,27%** (deviasi **-38,13%**) dan realisasi fisik sebesar **39,30%** (deviasi **-13,10%**). Meskipun beberapa kegiatan, seperti **7660.ABF** dan **7660.FAE**, telah melampaui target baik dari sisi keuangan maupun fisik, capaian program secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada kegiatan **7660.RBB**. Sementara itu, Program **Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan** juga menunjukkan capaian yang masih sangat rendah, dengan realisasi keuangan **7,52%** dan realisasi fisik **12,92%**, masing-masing mengalami deviasi sebesar **-44,88%** dan **-39,48%** terhadap target. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian proses administrasi dan pengadaan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar penyerapan anggaran dan progres fisik dapat meningkat sehingga target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai sesuai rencana.

2.3.4 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Terdapat beberapa Capaian Kinerja Kegiatan pada BP3KP Kalimantan II yang melingkupi capaian kinerja satker di bawahnya, yaitu Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satker PKP IKN. Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			220.395.962	110.313.584	50,05%	58,44%
1	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan	259.645	173.035	66,64%	67,55%
	7661.ABF.001	**Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**63.184**	**50.274**	**79,57%**	**81,61%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	63.184	50.274	79,57%	81,61%
	7661.ABF.002	**Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**41.584**	**23.477**	**56,46%**	**58,50%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	41.584	23.477	56,46%	58,50%
	7661.ABF.003	**Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**45.292**	**27.967**	**61,75%**	**63,79%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	45.292	27.967	61,75%	63,79%
	7661.ABF.004	**Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**52.070**	**31.683**	**60,85%**	**62,89%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	52.070	31.683	60,85%	62,89%
	7661.ABF.005	**Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**57.515**	**39.635**	**68,91%**	**70,95%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	57.515	39.635	68,91%	70,95%
2	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	150.385	80.563	53,57%	61,81%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
	7661.FAE.001	**Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**	**5**	**Laporan**	**150.385**	**80.563**	**53,57%**	**61,81%**
		Satker PKP Balai	1	Laporan	60.921	30.186	49,55%	51,59%
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	19.023	18.996	99,86%	99,86%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	25.997	16.280	62,62%	63,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	15.965	15.100	94,58%	94,58%
		Satker PKP IKN	1	Laporan	28.479	0	0,00%	0,00%
3	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		Unit	219.985.932	110.059.987	50,03%	45,97%
	7661.RBB.001	**PSU Perumahan Tapak Perkotaan**	**100**	**Unit**	**2.108.400**	**0**	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltim	100	Unit	2.108.400	0	0,00%	0,00%
	7661.RBB.003	**Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan**	**44**	**Unit**	**24.152.295**	**15.275.216**	**63,25%**	**75,25%**
		Satker PKP Kalsel	44	Unit	24.152.295	15.275.216	63,25%	75,25%
	7661.RBB.004	**Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan**	**65**	**Unit**	**82.222.369**	**37.872.468**	**46,06%**	**46,06%**
		Satker PKP Kaltim	65	Unit	82.222.369	37.872.468	46,06%	46,06%
	7661.RBB.007	**Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan**	**240**	**Unit**	**51.177.287**	**49.846.542**	**97,40%**	**97,47%**
		Satker PKP IKN	240	Unit	51.177.287	49.846.542	97,40%	97,47%
	7661.RBB.008	**Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan**	**2777**	**Unit**	**60.325.581**	**7.065.760**	**11,71%**	**11,05%**
		Satker PKP Kaltim	1177	Unit	25.589.929	3.267.886	12,77%	12,77%
		Satker PKP Kalsel	700	Unit	15.195.448	1.575.336	10,37%	10,37%
		Satker PKP Kaltara	900	Unit	19.540.204	2.222.538	11,37%	10,02%
Program Dukungan Manajemen								
	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			71.666	34.889	48,68%	41,84%
1	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		Layanan	71.666	34.889	48,68%	41,84%
	7676.EBA.962	**Layanan Umum**	**5**	**Layanan**	**47.265**	**23.973**	**50,72%**	**44,36%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	10.607	7.408	69,84%	71,88%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	13.440	11.890	88,47%	88,47%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	6.280	0	0,00%	0,00%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	7.605	4.675	61,47%	61,47%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	9.333	0	0,00%	0,00%
	7676.EBA.963	**Layanan Data dan Informasi**	**1**	**Layanan**	**14.163**	**10.916**	**77,07%**	**79,11%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	14.163	10.916	77,07%	79,11%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
	7676.EBA.Z06	**Layanan BMN**	**1**	**Layanan**	**10.238**	**0**	**0,00%**	**2,04%**
		Satker PKP Balai	1	Layanan	10.238	0	0,00%	2,04%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/

Tabel 2.15 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-II Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-II TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
D	**7661**	**Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**	**52,40%**	**50,05%**	**58,44%**	**-2,35%**	**6,04%**
1	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	52,40%	66,64%	67,55%	14,24%	15,15%
2	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	52,40%	53,57%	61,81%	1,17%	9,41%
3	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	52,40%	50,03%	45,97%	-2,37%	-6,43%
	7676	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan**	**52,40%**	**48,68%**	**41,84%**	**-3,72%**	**-10,56%**
1	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	52,40%	48,68%	41,84%	-3,72%	-10,56%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II TA 2026, Program **Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan realisasi keuangan sebesar **50,05%**, hanya sedikit di bawah target Renaksi sebesar **52,40%** (deviasi **-2,35%**), sedangkan realisasi fisik telah mencapai **58,44%** atau melampaui target sebesar **6,04%**. Capaian tersebut didukung oleh kinerja kegiatan **7661.ABF** dan **7661.FAE** yang telah melampaui target, meskipun masih terdapat kegiatan **7661.RBB** yang belum mencapai target baik dari sisi keuangan maupun fisik. Sementara itu, Program **Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** masih menunjukkan capaian di bawah target dengan realisasi keuangan **48,68%** (deviasi **-3,72%**) dan realisasi fisik **41,84%** (deviasi **-10,56%**). Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyelesaian kegiatan yang masih tertinggal, optimalisasi proses administrasi dan penyerapan anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian keuangan dan fisik dapat lebih selaras dan target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai.

2.3.5 Capaian Target Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berikut adalah Capaian Target Kinerja Triwulan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Capaian Triwulan II		
						Keu (Ribu Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko								
Program Dukungan Manajemen								
	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			107.674	41.019	38,10%	46,88%
1	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan	83.897	24.573	29,29%	22,51%
	7662.ABF.004	**Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**20.822**	**8.938**	**42,92%**	**45,01%**
		Satker PKP Balai	1	Rekomendasi Kebijakan	20.822	8.938	42,92%	45,01%
	7662.ABF.005	**Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi**	**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**63.075**	**15.635**	**24,79%**	**0,00%**
		Satker PKP Balai	2	Rekomendasi Kebijakan	63.075	15.635	24,79%	0,00%
2	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	23.777	16.446	69,17%	71,26%
	7662.FAE.001	**Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**	**1**	**Laporan**	**23.777**	**16.446**	**69,17%**	**71,26%**
		Satker PKP Balai	1	Laporan	23.777	16.446	69,17%	71,26%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/

Tabel 2.17 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal TKPR terhadap Target Rencana Aksi Kinerja TA 2026

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Target Capaian TW-II Berdasarkan Renaksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	Capaian TW-II TA 2026		Selisih Capaian	
				Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
E	**7662**	**Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**52,40%**	**38,10%**	**46,88%**	**-14,30%**	**-5,52%**
1	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	52,40%	29,29%	22,51%	-23,11%	-29,90%
2	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	52,40%	69,17%	71,26%	16,77%	18,86%

Sumber: Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada website https://my.pkp.go.id/; Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II TA 2026; Hasil Analisis Tahun 2026

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II TA 2026, Program **Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman** masih belum mencapai target Renaksi, dengan realisasi keuangan sebesar **38,10%** (deviasi **-14,30%**) dan realisasi fisik sebesar **46,88%** (deviasi **-5,52%**). Meskipun kegiatan **7662.FAE** menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian keuangan **69,17%** dan fisik **71,26%**, capaian program secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada kegiatan **7662.ABF**. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih tertinggal, optimalisasi penyelesaian proses administrasi dan penyerapan anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian keuangan dan fisik dapat lebih seimbang dan target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai sesuai rencana.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan II, realisasi kinerja dan penyerapan anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek teknis maupun administratif, berikut adalah rincian permasalahan yang terjadi di BP3KP Kalimantan II dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan pada Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 maupun Dokumen Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 dengan beberapa Unit Organisasi.

Tabel 2.18 Ringkasan Potensi dan Permasalahan serta Rencana Tindak Lanjut

Triwulan Sebelumnya (TW-I)					Triwulan II		
No	**Unit Organisasi**	**Potensi/ Permasalahan Triwulan Sebelumnya (TW-I)**	**Rencana Tindak Lanjut (TW-II)**	**Bukti Tindak Lanjut**	**No**	**Potensi/Permasalahan Triwulan II**	**Rencana Tindak Lanjut (TW-III)**
1	DIPA Sekretariat Jenderal	**Potensi:** Capaian kinerja menunjukkan realisasi kinerja telah memenuhi target yang direncanakan **Permasalahan:** Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	- Diharapkan kinerja tersebut tetap terjaga dan dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian kinerja	Telah dilakukan penyesuaian target kinerja sebagai tindak lanjut atas perubahan pagu anggaran agar selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun masih terdapat deviasi negatif dan target belum tercapai pada Triwulan II, realisasi kegiatan tetap menunjukkan capaian yang baik. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan selanjutnya.	1	**Potensi:** Realisasi fisik telah melampaui target Triwulan II (64,21% > 52,40%) sehingga menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. **Permasalahan:** Realisasi keuangan baru mencapai 45,16%, masih terdapat deviasi sebesar 7,24% dari target.	Mempercepat penyelesaian administrasi pembayaran dan penagihan atas kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan agar realisasi keuangan sejalan dengan progres fisik.
2	DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	**Potensi:** Pada aspek fisik realisasi sudah melebihi target yang telah ditentukan	- Optimalisasi penyerapan anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai	Telah dilakukan penyesuaian target kinerja sebagai tindak lanjut atas perubahan pagu anggaran dan telah	2	**Potensi:** Pelaksanaan kegiatan telah mencapai realisasi fisik 49,85% dan masih memiliki	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, meningkatkan koordinasi dengan

Triwulan Sebelumnya (TW-I)					Triwulan II		
No	**Unit Organisasi**	**Potensi/ Permasalahan Triwulan Sebelumnya (TW-I)**	**Rencana Tindak Lanjut (TW-II)**	**Bukti Tindak Lanjut**	**No**	**Potensi/Permasalahan Triwulan II**	**Rencana Tindak Lanjut (TW-III)**
		Permaslahan: - Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja dalam aspek keuangan menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target rencana - Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian Kinerja	dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Meskipun realisasi Triwulan II masih jauh dari target yang ditetapkan akibat kendala administratif, pada Triwulan III akan dilakukan langkah-langkah percepatan melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi, penguatan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.		peluang untuk dipercepat pada Triwulan III. **Permasalahan:** Realisasi keuangan baru mencapai 28,62% dan realisasi fisik masih sedikit di bawah target, menunjukkan masih terdapat kegiatan yang belum berjalan optimal.	PPK dan penyedia, serta mempercepat proses administrasi pembayaran untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
3	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	**Potensi:** Pada aspek keuangan realisasi sudah melebihi target yang telah ditentukan **Permaslahan:** - Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja dalam aspek fisik menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target rencana - Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	- Optimalisasi penyerapan anggaran. - Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian Kinerja	Telah dilakukan penyesuaian target kinerja sebagai tindak lanjut atas perubahan pagu anggaran agar selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun target belum tercapai pada Triwulan II baik dari segi fisik dan keuangan namun optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan selanjutnya.	3	**Potensi:** Masih tersedia alokasi anggaran yang besar sehingga peluang peningkatan realisasi pada semester II masih terbuka. **Permasalahan:** Realisasi keuangan hanya mencapai 10,89% dan fisik 26,11%, jauh di bawah target Triwulan II, mengindikasikan keterlambatan pelaksanaan kegiatan strategis.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan pelaksanaan kegiatan, menyusun strategi percepatan, serta melakukan monitoring secara intensif terhadap progres fisik dan keuangan.
4	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	**Potensi:**Pada program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan aspek keuangan dan fisik terealisasi melebihi target yang telah ditentukan **Permaslahan:** - Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja program dukungan manajemen baik dalam aspek fisik dan keuangan yang belum memenuhi target rencana - Keterlambatan Penetapan Perjanjian Kinerja Awal maupun Revisi	- Optimalisasi penyerapan anggaran pada kegiatan fisik.- Penyesuaian target kinerja sesuai perkembangan dan DIPA segera tertuang dalam Perjanjian Kinerja	Telah dilakukan penyesuaian target kinerja sebagai tindak lanjut atas perubahan pagu anggaran agar selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun masih terdapat deviasi negatif dan target belum tercapai pada Triwulan II, realisasi kegiatan tetap menunjukkan capaian yang baik. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan selanjutnya.	4	**Potensi:** Realisasi keuangan sebesar 49,37% dan fisik sebesar 50,14% menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah mendekati target Triwulan II. **Permasalahan:** Masih terdapat deviasi kecil terhadap target sebesar 52,40%, sehingga diperlukan percepatan agar target berikutnya dapat tercapai.	Mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan yang sedang berjalan, mempercepat penyampaian dokumen tagihan, dan melakukan pengendalian rutin terhadap progres pelaksanaan kegiatan.

Triwulan Sebelumnya (TW-I)					Triwulan II		
No	**Unit Organisasi**	**Potensi/ Permasalahan Triwulan Sebelumnya (TW-I)**	**Rencana Tindak Lanjut (TW-II)**	**Bukti Tindak Lanjut**	**No**	**Potensi/Permasalahan Triwulan II**	**Rencana Tindak Lanjut (TW-III)**
5	DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	**Potensi:** Pada aspek keuangan realisasi sudah melebihi target yang telah ditentukan **Permaslahan:** Terdapat selisih minus pada realisasi capaian kinerja dalam aspek fisik menunjukkan realisasi kinerja yang belum memenuhi target rencana	Optimalisasi penyerapan anggaran	Telah dilakukan penyesuaian target kinerja sebagai tindak lanjut atas perubahan pagu anggaran agar selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun masih terdapat deviasi negatif dan target belum tercapai pada Triwulan II optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran akan terus dilakukan pada triwulan selanjutnya.	5	**Potensi:** Kegiatan telah berjalan dengan realisasi fisik sebesar 46,88% sehingga masih memungkinkan untuk mencapai target tahunan. **Permasalahan:** Realisasi keuangan sebesar 38,10% dan fisik 46,88% masih berada di bawah target Triwulan II.	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi, mempercepat proses administrasi keuangan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3
Penutup

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran 2026

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II TA 2026, secara umum pelaksanaan program di lingkungan BP3KP Kalimantan II telah menunjukkan kemajuan dari sisi pelaksanaan fisik pada beberapa program, namun capaian realisasi keuangan masih belum sepenuhnya memenuhi target Renaksi. Program **Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal** dan **Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan** menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan capaian fisik telah melampaui target dan realisasi keuangan yang mendekati target. Sementara itu, Program **Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman**, **Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan**, **Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan**, serta **Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman** masih tercatat deviasi yang cukup signifikan, terutama pada realisasi keuangan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang telah melampaui target kinerja, namun capaian program secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada kegiatan-kegiatan utama (RBB) yaitu pada kegiatan fisik seperti bantuan stimulant perumahan swadaya, penanganan kawasan kumuh, penyediaan PSU rumah tapak, penyediaan sanitasi layak, yang memiliki kontribusi anggaran besar. Oleh karena itu, pada Triwulan III diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi proses pengadaan dan administrasi pembayaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan keselarasan antara capaian fisik dan penyerapan anggaran, sehingga target kinerja dan realisasi anggaran pada akhir Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah rincian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan BP3KP Kalimantan II yang mencakup pelaksanaan 5 (lima) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:

Tabel 3.1 Perbandingan Rencana dan Realisasi Seluruh DIPA pada Triwulan II

No	DIPA	Pagu (Rp Ribu)	Rencana			Realisasi		
			Keu (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	DIPA Sekretariat Jenderal	5.443.553	2.852.422	52,40%	52,40%	2.458.256	45,16%	64,21%
2	DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	19.480.310	10.207.682	52,40%	52,40%	1.768.315	28,62%	49,85%
3	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	129.538.572	67.878.212	52,40%	52,40%	18.475.933	10,89%	26,11%
4	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	220.467.628	115.525.037	52,40%	52,40%	110.348.473	49,37%	50,14%
5	DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	107.674	56.421	52,40%	52,40%	41.019	38,10%	46,88%
Jumlah		**375.037.737**	**196.519.774**	**52,40%**	**52,40%**	**133.091.996**	**34,43%**	**47,44%**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

3.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II, diketahui bahwa terdapat banyak program dan kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada triwulan II. Sehingga, diperlukan rencana tindak lanjut sebagai langkah strategis untuk menjaga meningkatkan konsistensi kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mengantisipasi potensi risiko pada periode selanjutnya. Rencana tindak lanjut ini disusun sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam memastikan pencapaian target kinerja dan optimalisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran. Adapun rencana tindak lanjut yang disusun yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih mengalami deviasi terhadap target Renaksi melalui penyusunan rencana aksi (action plan) yang terukur beserta target penyelesaian pada setiap triwulan.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, penyelesaian administrasi kontrak, verifikasi dokumen, dan proses pembayaran agar realisasi keuangan dapat meningkat sesuai target.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan, khususnya pada kegiatan utama (RBB) yang memiliki kontribusi anggaran terbesar, guna mengidentifikasi hambatan dan memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu.
4. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyedia jasa, pemerintah daerah, serta unit kerja terkait, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan pengendalian secara berkala terhadap keselarasan capaian fisik dan realisasi keuangan, sehingga progres pelaksanaan kegiatan sejalan dengan penyerapan anggaran dan target yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah melampaui target sebagai bahan pembelajaran (best practice) serta menerapkan strategi yang relevan pada kegiatan lain yang masih mengalami keterlambatan.
7. Melakukan pemantauan intensif terhadap capaian indikator kinerja melalui rapat evaluasi rutin dan penyampaian laporan perkembangan sebagai dasar pengambilan keputusan serta langkah percepatan oleh pimpinan.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada Semester II Tahun Anggaran 2026 agar deviasi capaian Triwulan II dapat diminimalkan dan target kinerja serta realisasi anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA